

IMPLEMENTASI PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA OUTBOUND DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

Andi Feby Febriani¹, Muhammad Ikbal², Erfina³

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: andifebyfebriani.0910580419062@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Program Pertukaran Mahasiswa Mandiri Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang tahun 2022 akan menerapkan kebijakan pemerintah dan membangun kapabilitas. Penelitian ini menggunakan teori Edward III. Teori implementasi kebijakan yang disajikan menggunakan metodologi studi kasus dan gaya penelitian kualitatif. Peserta program Pertukaran Mahasiswa Gratis adalah subjek penelitian, bersama dengan dosen. Pengamatan langsung dan wawancara adalah dua metode pengumpulan data yang digunakan. N-Vivo 12 Plus digunakan untuk melakukan analisis data. Implementasi persyaratan negara untuk pertukaran mahasiswa mandiri berjalan dengan baik, karena dosen dan staf bekerja sama untuk memenuhi tugas mereka. Selain itu, birokrasi kampus memiliki beberapa kendala terutama dalam organisasi dan komunikasi.

Kata Kunci: *Implementasi, Pertukaran Mahasiswa, Mahasiswa Outbound*

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine how the Independent Student Exchange Program at Muhammadiyah Sidenreng Rappang University in 2022 will implement government policies and build capabilities. This study uses the theory of Edward III. The theory of policy implementation is presented using a case study methodology and a qualitative research style. Participants in the Free Student Exchange program are research subjects, along with lecturers. Direct observation and interviews are the two data collection methods used. N-Vivo 12 Plus is used to perform data analysis. Implementation of state requirements for independent student exchanges is going well, as faculty and staff work together to fulfill their duties. In addition, the campus bureaucracy has several obstacles, especially in organization and communication.

Keywords: *Implementation, Student Exchange, Outbound Students*

PENDAHULUAN

Riset dan Teknologi Republik
Kebijakan Belajar Mandiri Indonesia yang memberikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, kesempatan kepada mahasiswa untuk

meningkatkan keterampilan sesuai dengan kemampuan dan minatnya serta menguasai yang berbeda-beda, termasuk Kampus Merdeka yang juga dikenal dengan MBKM. pengetahuan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mata kuliah unggulan kemampuan membina pengembangan kecemerlangan intelektual, akhlak mulia, dan bakat lulusan pascasarjana agar berdaya saing di dunia industri (dudi) dan dunia kerja (Faiz & Purwati, 2021).

Institusi pendidikan harus mampu merencanakan kurikulum dan menyiapkan ruang dukungan dan pengembangan adaptif, yang dipandang sebagai tantangan atau ancaman, kompleksitas dan kejutan pendidikan kini dilihat sebagai motor penggerak pembangunan dan adaptasi. tentang pendidikan digital. Selanjutnya perguruan tinggi dituntut untuk membuat strategi pengajaran berdasarkan Merdeka Learning Kampus Merdeka. (Dzikria, 2021)

Berdasarkan Keputusan Menteri No. 03 Tahun 2020, yang memberikan pilihan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi mandiri selama dua semester. Program ini memberi siswa kesempatan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis sesuai dengan minat dan tujuan mereka. (Febriani & Ikbal, 2023) Dalam kebijakan MBKM pimpinan PT, perlu memfasilitasi hak mahasiswa untuk mendapat SKS dari perguruan tinggi luar maksimal 2

semester atau dapatkan 40 kredit melalui berbagai program studi. 20 sks atau 1 semester di universitas yang sama. Di dalam mata kuliah dan di luar mata kuliah, bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan sesuai Pasal 15(1) Permendikbud No.3 Tahun 2020, antara lain: Pertukaran pelajar, magang/penempatan kerja, belajar mandiri, kampus mengajar, proyek kemanusiaan, penelitian/penelitian, KKN tematik dan kewirausahaan.

Peserta Pertukaran Mahasiswa Mandiri (PMM), menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, lebih berpeluang untuk berhasil dibandingkan nonpeserta. Calon pemimpin masa depan yang akan mendorong Indonesia bangkit dari pandemi dan maju. "Mahasiswa yang tergabung dalam program ini ditantang untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri, mengambil keputusan yang cerdas, belajar berkolaborasi, bekerja sama dan mencintai keberagaman. Peserta akan menyelesaikan program pertukaran ini selama satu semester, atau lima bulan, selama terdaftar di semester 3, 5, dan 7. Menggabungkan modul Nusantara, yang memungkinkan pertukaran pelajar lintas pulau dari PTN ke PTS dan sebaliknya, program pertukaran pelajar menyoroti keragaman budaya Indonesia. Ada 5 kebijakan yang terkait dengan Paket Kampus Merdeka, yaitu 1. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi; 2. Studi universitas (hak belajar di luar program studi; 3. Kemudahan

membuka program studi baru; 4. penerimaan mahasiswa baru; dan 5. Perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Sebanyak 11.464 mahasiswa, baik dari perguruan tinggi pengirim maupun penerima, akan mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka yang diluncurkan pada tahun 2021. Pertukaran mahasiswa Merdeka memungkinkan peserta untuk merasakan keragaman budaya Indonesia yang kaya, menjalin pertemanan dengan mahasiswa dari berbagai daerah di tanah air, dan mengikuti kursus di universitas lain. Pertukaran pelajar dapat membentuk sikap pelajar, seperti. Menghormati keragaman budaya, pendapat, agama, kepercayaan, pendapat atau pengetahuan asli orang lain, kerjasama, kepekaan sosial atau komitmen sosial terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pertukaran mahasiswa Merdeka tahap kedua ditujukan bagi 16.000 mahasiswa yang dapat memilih salah satu dari 194 universitas tuan rumah. “Berbeda dengan tahun lalu, (mahasiswa) sekarang bisa memilih universitas tempat mereka akan praktik. Hukum. (Zainudin & Utami, 2021). Pada tahun ini, prosedur baku pengajuan permohonan tidak hanya

mensyaratkan izin pengirim PT; juga mensyaratkan izin pelamar atau wali pelamar untuk mengikuti Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dan mentaati semua ketentuannya serta menerima hasil Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2. (Hernawan et al., 2022)

Selain itu, kandidat yang memungkinkan termasuk mahasiswa (i) yang memiliki dua atau lebih dosis vaksinasi Covid dan kartu tanda penduduk (KTP) aktif, rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), atau Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama mereka. -19 Vaksinasi dan sebaiknya BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat yang mewakili jaminan kesehatan aktif (KIS).

Beberapa kegiatan dapat dilakukan dalam program *learning exchange* ini, antara lain sebagai berikut: 1) pertukaran mahasiswa antar program dalam universitas yang sama, 2) pertukaran mahasiswa antar program lain dalam universitas yang sama, 3) pertukaran mahasiswa dalam program yang sama di universitas yang berbeda, 4) pertukaran pelajar antar program antara dan di universitas yang berbeda. Pada program gelar lain di universitas yang sama, pembelajaran berlangsung secara tatap muka atau dalam jaringan (online).

Tabel 1. Program MBKM 2021- 2022

No	Program MBKM	Batch I	Batch II	Batch III
1	Pertukaran Mahasiswa Merdeka	64	68	
2	Magang Bersertifikat	0	1	1
3	Studi Independen	1	7	1
4	Kampus Megajar	13	13	5
5	Proyek Kemanusiaan			
6	Penelitian/Riset			
7	KKN Tematik			
8	Kewirausahaan		-	-

Sumber: SK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022)

Berdasarkan data table 1 menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang lulus Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2020-2022 dengan rincian program dan batch masing-masing : Pertukaran mahasiswa Merdeka Batch I sebanyak 64 mahasiswa, Batch II sebanyak 68 mahasiswa, Magang Bersertifikat Batch I tidak ada mahasiswa yang lulus, Batch II sebanyak 1 mahasiswa lulus, Batch III sebanyak 1 mahasiswa, Studi Independen Batch I sebanyak 1 mahasiswa, Batch II sebanyak 7 mahasiswa, Batch III sebanyak 1 orang, Kampus Mengajar Batch I sebanyak 13 mahasiswa, Batch II sebanyak 13 mahasiswa, Batch III sebanyak 5 mahasiswa.

Tabel 2. Program PMM 2021-2023

No	Tahun	Jumlah		
		Daftar	Lulus	Aktif
1	2021-2022	139	68	64
2	2022-2023	135	68	68

Sumber: SK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan data table 2 menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang mendaftar Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2020-2021 sebanyak 139 mahasiswa, sebanyak 68 mahasiswa dinyatakan lulus, sebanyak 64 mahasiswa dinyatakan aktif, sebanyak 4 mahasiswa dinyatakan tidak aktif, tahun 2021-2022 sebanyak 135 mahasiswa mendaftar Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, sebanyak 68 dinyatakan lulus dan aktif. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Universitas Swasta Muhammadiyah Sidenreng Rappang atau biasa dikenal dengan UMS Rappang merupakan bagian dari jaringan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang) diberikan

perangkat berbasis IT untuk membantu mereka mencapai tujuan profesional mereka di masa depan. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang), salah satu perguruan tinggi swasta (PTS), turut andil dalam pelaksanaan inisiatif Kampus Merdeka Belajar Merdeka.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini melibatkan upaya untuk mengontrol input, output, atau hasil bagi masyarakat. Ada beberapa cara untuk melihat pelaksanaan kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkat birokrasi. Menurut (Samad, 2022): "Implementasi kebijakan terlihat dari sudut pandang (1) pengambil keputusan, (2) eksekutif di lapangan dan (3) tujuan politik (kelompok sasaran)". Perspektif implementasi menurut Wahab (2005): Implementasi berfokus pada "tindakan yang diambil oleh pejabat dan otoritas lokal untuk mencapai keberhasilan program".

Jelas bahwa variabel atau elemen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap bagaimana kebijakan publik diimplementasikan akan menggunakan model-model implementasi kebijakan untuk memudahkan pemahaman. Salah satu model yang menurut para ahli dapat digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan publik adalah yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980), dan Masmanian dan Sabatier

(1980). Penting untuk disadari bahwa eksekusi strategi jarang berjalan sesuai rencana. Hasil penerapan rencana mungkin dipengaruhi oleh berbagai keadaan. Model implementasi strategi digunakan untuk memahami secara tepat elemen atau variabel yang mempengaruhi eksekusi strategi publik. Ada strategi implementasi lain yang telah mendapat persetujuan pejabat tingkat bawah, termasuk Model Pelaksanaan Kebijakan Publik (George Edward III).

Pendidikan tinggi di Merdeka Learning Kampus Merdeka diantisipasi untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada mahasiswa untuk menemukan dan mewujudkan potensi penuh mereka melalui kegiatan kreatif, belajar melalui teknologi informasi, dan kemajuan teknis lainnya. Berdasarkan survei tahun 2020 yang dilakukan oleh Ditjen Dikti, Program Pertukaran Pelajar Nusantara (PERMATA) merupakan salah satu program MBKM yang paling diminati mahasiswa (Rodiyah, 2021). Mahasiswa diizinkan untuk mengambil tiga semester kursus di luar program akademik mereka di bawah kebijakan Kampus Merdeka Belajar Merdeka (MBKM) (Sulistiyani et al., 2022). Untuk mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, diperlukan kegiatan MBKM (Polihu, 2021). Siswa diharapkan mengikuti salah satu dari delapan program yang ditawarkan untuk mengembangkan kemampuan

keras dan lunak mereka. (Rodiyah, 2021).

Sejak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tentang Standar Tahun 2020 Perguruan Tinggi Nasional, pemerintah menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Peraturan tersebut memberikan hak kepada siswa mempelajari mata kuliah non universitas selama tiga semester. Pemberian Hak Sangat penting bahwa universitas memungkinkan siswa untuk belajar di luar kampus. (Jumadi et al., 2021) Program MBKM mengikuti model link and match mantan menteri pendidikan budaya Wardiman Djonegoro pada tahun 1993.

Peraturan Perundang-undangan berikut menjadi landasan bagi program Pertukaran Pelajar Mandiri: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Undang-Undang Sisdiknas Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 3) Undang-Undang Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012. 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5) Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang kerja sama perguruan tinggi.

Intinya, pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa diwujudkan dengan cara yang sangat penting di Kampus Merdeka. Melalui realitas dan dinamika lapangan seperti kebutuhan kemampuan, masalah nyata, interaksi sosial, kolaborasi, pengelolaan diri, tuntutan kinerja, target, dan prestasi, pembelajaran di Kampus Merdeka menawarkan tantangan dan peluang untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. (Hernawan et al., 2022) Penting untuk menilai seberapa sukses perguruan tinggi yang mengikuti kegiatan Merdeka Learning Kampus Merdeka (seperti UMS Rappang) mengimplementasikan program tersebut. Memahami apa yang harus dicapai Perguruan tinggi berperan penting dalam meningkatkan kinerja kegiatan MBKM dalam rangka pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan kegiatan MBKM yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi. Kelompok pengguna dan kelompok penyelenggara (pendidik dan tenaga kependidikan) (mahasiswa) merupakan dua kelompok utama yang mengikuti kegiatan MBKM, sehingga universitas melakukan kajian kegiatan di lingkungan kampus dengan fokus pada mereka.

Model eksekusi strategi akan digunakan pada saat itu untuk secara jelas mengidentifikasi elemen atau variabel yang berdampak pada penerapan pendekatan publik dan bekerja pada pemahaman. Banyak model eksekusi, seperti model eksekusi

strategi publik yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980), dan Masmanian dan Sabatier, telah diterima oleh otoritas yang paling relevan (1987). Menurut George Edward III dalam Widodo (2010: 96), ada empat aspek yang meliputi faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi rencana. Program pertukaran pembelajaran kampus otonom di UMS Rappang menunjukkan penerapan undang-undang yang akan menghasilkan penelitian akademis yang menarik.

Partisipasi pada program Pertukaran Mahasiswa Merdeka meningkatkan keterlibatan praktisi industri dalam kegiatan perkuliahan untuk memberikan wawasan lebih kepada mahasiswa (i). Peningkatan keterlibatan industri sangat berguna untuk kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja. Selain itu, peningkatan ini juga dimaksudkan untuk persiapan siswa ingin berpartisipasi dalam program tersebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah bahwa melalui program ini, kesempatan bagi siswa untuk memperkaya dan menambah pengetahuan serta kompetensi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, penelitian ini. Sugiono mendefinisikan

penelitian kualitatif sebagai studi di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dan pengumpul data induktif. (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini, 15 mahasiswa dan 4 dosen ditanya tentang implementasi kebijakan kampus Merdeka Mahasiswa, khususnya sebagai bagian dari program pertukaran mahasiswa mandiri. Untuk menjaga kesejahteraan psikologis subjek, yang disyaratkan dalam etika penelitian, nama subjek sengaja disembunyikan dalam penelitian ini. N-Vivo 12 Plus digunakan untuk analisis data. Snowball sampling adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Penetapan sementara informan sumber data dalam proposal pada akhirnya akan digantikan oleh peneliti lapangan. Secara khusus, metode pemilihan sampel dari sejumlah sumber data yang ukurannya bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah informan sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan sebagaimana digambarkan oleh Edward III betapapun efektifnya suatu kebijakan, jika tidak direncanakan dan dipersiapkan secara memadai untuk

implementasinya, maka tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai. Pengamatan lapangan yang dimasukkan ke dalam topik yang akan disajikan ditemukan sebagai konsekuensi dari percakapan dengan subjek, yaitu: komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan disposisi.

1. Komunikasi (*Communication*)

Proses penyampaian informasi Dosen/Staff kepada mahasiswa yang ikut melaksanakan program pertukaran mahasiswa merdeka dapat dikatakan cukup tinggi dengan presentase 20,4% dari persiapan yang dilakukan dosen/staff dengan memberikan sosialisasi kepada mahasiswa agar mendaftar program pertukaran mahasiswa merdeka. Edward III mengutarakan proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan harus dikomunikasikan kepada para pelaku kebijakan agar mereka memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan dan mencapai maksud dan tujuannya.

2. Sumber Daya

Sumber daya dipilih sebagai unsur yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena kebijakan harus didukung oleh sumber daya manusia serta sumber daya keuangan dan anggaran untuk dilaksanakan. Dosen/Staff mempunyai peranan penting dalam program pertukaran mahasiswa merdeka dapat dikatakan sangat

tinggi dengan presentase 31,39% karena pelaku utama kebijakan diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Edward III mengutarakan bahwa masalah sumber daya memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan.

a. Sumberdaya Manusia.

Sumberdaya manusia merupakan masalah sumber daya memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan dalam hal ini mahasiswa, dosen/ staff yang terlibat dalam program PMM. Kemampuan dosen/staff yang terlibat mempunyai segala potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam organisasi.

b. Sumberdaya Anggaran.

Terkait anggaran dana dari LPDP ke rekening mahasiswa PMM sesuai dengan jumlah yang diverifikasi, sesuai dengan buku panduan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan fasilitas yang tersedia dalam program pertukaran mahasiswa merdeka, tentu bantuan biaya kuliah yang sumber pembiayaan penyelenggaraan program pertukaran mahasiswa merdeka berasal dari LPDP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.

3. Struktur Birokrasi Tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, para dosen/staff (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:” Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”

a. Fragmentasi

Struktur Birokrasi dalam hal ini tim yang bertanggungjawab pada program MBKM UMS Rappang menyatakan dengan baik pemisahan kegiatan kerja antara satu dengan yang lain

b. Standard Operasional Prosedur (SOP)

Implementasi Kebijakan Program PMM memiliki SOP atau prosedur-prosedur kerja. SOP dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas.

4. Disposisi

Edward III menyatakan bahwa disposisi adalah kemauan,

keinginan, dan kecenderungan para aktor untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Para pelaku untuk menjalankan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud mirip sekali. Dosen/staff mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat keputusan berhubungan dengan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan.

Bagan 1. Dosen



Sumber: Hasil Analisis Olahan Data Nvivo12 Plus, 2022

Berdasarkan Bagan 1 terdapat keunikan pada keempat indikator pada bagan tersebut, dimana disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya memiliki perbedaan yang tidak jauh berbeda dengan rendahnya komunikasi dari ketiga indikator lainnya (disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya), yang memiliki persentase gabungan sebesar 34,68%. Tim yang bertugas mengelola dan membantu mahasiswa dalam proses pelaksanaan program pertukaran mahasiswa mandiri telah berkembang dengan sumber daya

dalam kategori sangat tinggi berkat kerja dosen dan staf. Proses dosen berkomunikasi dengan mahasiswa tentang program pertukaran mahasiswa mandiri melalui media sosial (WhatsApp) dalam memberikan arahan, informasi terkini, dan tidak dapat mengetahui gerakan, gerak tubuh, dan ekspresi lawan bicara, menyebabkan mahasiswa memiliki prasangka yang salah. dan kurang tanggap terhadap informasi yang diterima. Hal ini menempatkan komunikasi dalam kategori rendah. Disposisi dalam kategori "cukup" karena staf dan dosen memiliki sikap yang baik terhadap mahasiswa, mendorong mereka, dan berkolaborasi untuk membantu mereka melaksanakan program pertukaran mahasiswa mandiri mereka. Karena upaya dosen dan staf sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya untuk mendukung mahasiswa dalam proses pelaksanaan program pertukaran mahasiswa mandiri, maka struktur birokrasi berada pada kategori tinggi.

sosialisasi, ketidaktahuan teknis, dosen/pegawai menunggu perintah pusat sehingga lamban dalam menindaklanjuti kesulitan mahasiswa, dan lain-lain. Karena pihak kampus memberikan pengarahan dan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan saat melakukan program pertukaran mahasiswa mandiri, komunikasi dengan persentase 21,55% sudah cukup. Karena pembagian tugas dan tanggung jawab antara dosen dan staf berjalan dan memahami alur mekanisme selama pelaksanaan program pertukaran mahasiswa mandiri, struktur birokrasi telah ditetapkan dengan kategori tinggi 30,75%. Sumber daya memiliki persentase 31,61%, yang cukup tinggi untuk kategori berkat keterlibatan staf dan dosen yang membantu dan akomodatif dalam pelaksanaan program pertukaran mahasiswa mandiri.

Bagan 2. Mahasiswa



Sumber: Hasil Analisis Olahan Data Nvivo12 Plus, 2022

Berdasarkan Bagan 2, kelompok Disposisi memiliki proporsi yang rendah yaitu 16,09% karena kurangnya

Gambar 1. Kata yang sering Muncul



Sumber: Hasil Analisis Olahan Data Nvivo12 Plus, 2022

Merdeka Belajar Kampus Merdeka menjadi krusial bagi Strategi Pembelajaran Merdeka Dinas

Pendidikan, Kebudayaan, Eksplorasi, dan Inovasi Republik Indonesia karena menawarkan kepada mahasiswa kesempatan yang sangat berharga untuk mengembangkan keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya. dan menguasai berbagai mata pelajaran untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja. Bagi mahasiswa pascasarjana, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat menumbuhkan wawasan, harga diri, dan keterampilan yang memungkinkan mereka bersaing baik di dunia maju (Duma) maupun dunia kerja (Krisnanik, Saphira, dan Indriana, 2021). Perubahan zaman yang sangat kuat membutuhkan investasi dari banyak pihak, bukan hanya persaingan.

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi Program pertukaran merdeka belajar kampus merdeka UMS Rappang memperlihatkan Implementasi kebijakan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam secara akademik sebagai berikut: a.Pihak kampus baik dosen/staff dalam proses komunikasi dengan mahasiswa dalam pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka masih kurang efektif karena informasi yang disampaikan hanya melalui media sosial (WatsApps) itu tidak bisa mengetahui gerak-gerik, gestur dan mimik lawan bicara

sehingga menyebabkan mahasiswa kurang respon b.Pihak kampus baik dosen/staff berperan sangat baik dengan membentuk tim-tim yang bertanggungjawab menangani dan membantu mahasiswa melalui komunikasi dengan Person In Charge (PIC) pada pelaksanaan program tersebut. c.Pihak kampus baik dosen/staff telah di seleksi oleh Kementrian dan mempunyai proporsi tugas dan fungsinya serta pelaksanaan yang sudah dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) masing-masing program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. d.Pihak kampus baik dosen/staff memiliki dedikasi yang tinggi pada kebijakan yang ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi mahasiswa yang ikut melaksanakan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

KESIMPULAN

Program pertukaran pelajar ini sangat berkesan bagi para mahasiswa(i) dan institusi pendidikan. Kegiatan ini merupakan awal dari kerjasama yang baik antara kedua universitas. Walaupun indikator disposisi masih dalam kategori rendah karena berkas yang seharusnya segera diselesaikan kepada mahasiswa terkendala konfirmasi dari pusat serta komunikasi karena selama pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa Mandiri baik dosen maupun mahasiswa hanya bertukar informasi saja, program Pertukaran

Mahasiswa Mandiri di UMS Rappang efektif mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Policy. *Jurnal GOVERNANSI*, 8(1), 1–10.

Jumadi, Priyana, Y., Danardo, Sunariya, M. I. T., Saputra, A., Amin, C., ... N.Fikriyah, V. (2021). Kegiatan MBKM untuk Mendukung Pengembangan Perguruan Tinggi dan Pembangunan: Studi Kasus Pelaksanaan Magang Bersertifikat di Kementerian ATR / BPN. *Seminar Nasional Dan Call of Paper Implementasi Dampak MBKM*, (12), 1–9.

Polihu, N. (2021). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kantor Kementerian Agama Kota Manado. *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 2(2), 21–27. <https://doi.org/10.53682/administro.v2i2.1684>

Rodiyah, R. (2021). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional. *Jurnal Nasional Hukum*, 7(2), 425–434.

Samad, A. W. (2022). Analisis Data Sumber Daya Manusia Dalam Isu-Isu Global. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 2(1), 99–110. <https://doi.org/10.55927/ijba.v2i1.68>

DAFTAR PUSTAKA

Dzikria, N. (2021). Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MbkM) Di Perguruan Tinggi. *Research and Development Journal of Education*, 8(2), 783. <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i2.12865>

Faiz, A., & Purwati, P. (2021). Koherensi Program Pertukaran Pelajar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan General Education. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 649–655. Retrieved from <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/378>

Febriani, A. F., & Iqbal, M. (2023). Pengembangan skill mahasiswa melalui program. *Jurnal ilmiah dinamika sosial*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.38043/jids.v7i1.3995>

Hernawan, D., Seran, G. G., Purnamasari, I., Multi, A., Apriliani, A., Publik, S. A., ... Komunikasi, S. (2022). Perspektif Kebijakan Berbasis Bukti Terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Evidence-Based Policy Perspective on Implementation of Freedom To Learn Independent Campus

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Volume 9, Nomor 2, Mei 2023

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 5 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

(318-330)

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi Metode R&D*. Bandung: a.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan*

Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi (p. 557). p. 557. Bandung: Alfabeta.